ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU TAHUN 2010-2011

Penulis : PATRICK TAMPUBOLON, Dosen Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M,Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Unversitas Riau

patrick.tampubolon@gmail.com

ABSTRACT

This study entitled Analysis Implementation Function Inspectorate city Pekanbaru Year 2010-2011. This study aimed to determine the effectiveness Implementation of local government performance monitoring functions in office inspectorate city Pekanbaru , as well as to analyze the factors that influence the effectiveness of local government performance monitoring functions at the Regional Inspectorate Office Pekanbaru.

Based on the analysis of the implementation of the monitoring function in particular the Office of the Regional Inspectorate of Pekanbaru turns out it can be concluded that the implementation of the monitoring well seen from inspection, testing to the investigation, was not optimal, this is due to the inaccuracy of time in conducting surveillance, not of accuracy of data deviations found for personnel supervisor at office Inspectorate of Pekanbaru.

Factors affecting the implementation of the monitoring of the implementation of the functions of governance in the city of Pekanbaru is the apparatus includes officers who have the skills, knowledge in handling jobs, the negative opinion of the object of the inspection and supervision of activities in addition to the availability of facilities and infrastructure to support the implementation of the monitoring carried out by Inspectorate office in Pekanbaru.

Keywords: Monitoring, Control Functions, Implementation Oversight Functions

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kota Pekanbaru Tahun 2010-2011. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah pada kantor Inspektorat Kota Pekanbaru, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah pada kantor Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum optimal, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat Kota Pekanbaru.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani, opini negatif dari obyek pemeriksaan terhadap kegiatan pengawasan dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru

Kata Kunci : Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah perlu didukung oleh suatu lembaga pengawasan di daerah, sehingga kewenangan tersebut tidak disalahgunakan oleh aparat Pemerintah Daerah. Urgensi lembaga pengawasan di daerah sangat dibutuhkan, bukan hanya karena luasnya kewenangan yang dimiliki, namun juga praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak selalu mulus. Dengan demikian, pengawasan pada umumnya dan pengawasan fungsional pemerintah pada khususnya, memegang peranan penting dalam mengarahkan *clean government* dan *good governance*.

Pengawasan terhadap pemerintahan menjadi penting, oleh karena pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan tidak mungkin terlepas dari ketidaktertiban (*unorder*). Dalam kaitan ini,(S. F. Marbun, 2001 Hal. 125) menegaskan: "Relevansi pengawasan terhadap pemerintahan bertolak dari pemikiran, bahwa pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintahan, adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik, dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah, sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula, dan tetap dalam batas kekuasaannya". Pengawasan diperlukan untuk koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan sebagai media kontrol terhadap Pemerintah Daerah yang bermakna, sebagai usaha preventif atau perbaikan bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, juga sebagai tindakan represif, hal mana dasar-dasarnya diatur dalam konstitusi dan penjabarannya diatur dalam undang-undang.

Dilihat dari segi politik dan ketatanegaraan, dampak positif dari reformasi total telah terjadi pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan dari system sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik. Harus diakui bahwa selama ini sistem pemerintahan yang dijalankan masih sangat sentralistis. Sistem ini memberikan peluang yang sangat besar kepada Pusat untuk melakukan intervensi pada hampir seluruh dimensi kehidupan. Sistem ini juga telah menciptakan dominasi Pemerintah Pusat atas Pemerintah Daerah dan dominasi Pemerintah atas masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah, pola pemerintahan sentralistis yang dijalankan selama ini telah menghambat proses belajar sekaligus menumpulkan inisiatif dan kreatifitas dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Daerah tidak bisa berkembang dan memunculkan efisiensi untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat lokal. Daerah menjadi ketergantungan pada pemerintah pusat. Dalam iklim ketergantungan itulah pemerintah daerah dijadikan alat untuk melayani kepentingan Pusat di Daerah. Dengan pergeseran paradigma pemerintahan ini telah memberikan keleluasaan dan menciptakan motivasi sendiri kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Sampai saat ini upaya untuk mencari potret atau sosok pemerintahan yang ideal masih menjadi isu menarik. Pemerintahan yang ada, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif harus memiliki kinerja untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Kurangnya kemampuan pemerintah membuat masyarakat mulai meragukan integritas pemerintahan. Akibatnya program pemerintah kadang tidak didukung oleh masyarakat bahkan terjadi pertentangan. Menyadari hal itu, beberapa kelompok cendikiawan dan masyarakat yang perduli terhadap masa depan Indonesia mulai berpikir tentang ide-ide untuk memperbaiki kinerja aparat dan institusi pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara berkembang termasuk Indonesia diajak untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya dengan mengadopsi

"good governance" sebagaimana dipromosikan oleh *World Bank*, UNDP, *United Nations Development Programme* dan beberapa agen internasional lainnya. Visi institusi yang jelas, bekerja efisien dan efektif, transparan dalam pengambilan keputusan, akuntabel dalam berbagai tindakan dan keputusan, menghormati hak asasi manusia, merupakan nilai-nilai utama yang perlu mendapatkan perhatian. (Yeremias T. Keban, 2000 Hal. 2)

Sejalan dengan itu pemerintah Kota Pekanbaru pun mensinergikan diri dalam menjalankan praktik pemerintahan dengan prinsip otonomi daerah dalam rangka mewujudkan *Good Local Governance.* Perwujudan *good local governance* tersebut bahkan menjadi visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam lingkup ini maka sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha untuk mewujudkan *good local governance* di Kota Pekanbaru itu, peran pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru sebagai pengawas internal pemerintah harus optimal dan dapat menjaga integritas pemerintahan agar tidak terjadi penyelewengan dan tindakan kecurangan pemerintahan. Karena sebagai bagian internal dalam pemerintahan, Inspektorat Daerah mempunyai peranan dan norma pengawasan tersendiri serta harus melaksanakannya sebagai bagian penting dalam proses pelaksanaan *good governance.* Inspektorat Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan yang secara tegas harus mengawal jalannya praktek pemerintahan, sehingga bisa mencegah dan mendeteksi penyelewengan oleh aparatur pemerintah melalui pengawasan yang optimal. Peningkatan pengawasan bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel dan bebas KKN. Sebagai salah satu SKPD dalam *good local governance*, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah me-*review* laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Berkenaan dengan itu diidentifikasikan ada dua permasalahan, yaitu :

1. Pengawasan yang belum optimal.
   Isu pengawasan yang belum optimal sangat berkaitan erat dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur Inspektorat yang kompeten dan ketepatan waktu pengawasan terhadap obyek pemeriksaan (obrik).
2. Belum tercapainya Pemerintahan yang baik (good governance) dan melayani.
   Dalam peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 26 ayat (4) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
   a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
   b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
   c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Kemudian dalam pasal 28 ayat (1) disebutkan : Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi
dan kewenangannya melalui:

a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan. Dan
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang di laksanakan oleh inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan melayani menuju tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance).

Agar terciptanya *good local governance*, Inspektorat Kota Pekanbaru sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari segi aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Kota Pekanbaru mempunyai fungsi *controlling* yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD.

Selain itu, masyarakat mengharapkan pengawasan lebih dari sekedar memperbaiki kesalahan melainkan harus diminta pertanggung jawaban kepada yang bersalah. Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis menetapkan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu :

Bagaimana Inspektorat Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi pengawasan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitiana ini yaitu :

Mendeskripsikan proses pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengadakan penelitian ini dengan mengharapkan adanya manfaat yang diberikan pada berbagai pihak, baik pada manfat akademis maupun manfaat praktis, antara lain :

a. Sumbangan pemikiran bagi pihak lain atau peneliti lanjutan, khususnya yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini.
b. Sebagai penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan.
c. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya pada Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teoritis

Sebagai konsep teoritis dalam penelitian ini, akan diketengahkan beberapa konsep penting untuk membantu melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian. Konsep-konsep berikut berkaitan dengan analisis pelaksanaan fungsi inspektorat kota pekanbau yang meliputi, Pengertian Pengawasan, Maksud dan Tujuan Pengawasan, Teknik Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Tindak Lanjut Pengawasan, Pengawasan yang efektif.

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar

tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpagan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaanya. Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.*Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results*. (Schermerhorn,2002) Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . *the process of ensuring that actual activities conform the planned activities*. (Stoner,Freeman,&Gilbert,1995)

Menurut Winardi (2000, hal. 585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".

Sarwoto (2010 : 94) menyatakan bahwa : ” Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Fathoni (2006 : 30) mendefinisikan bahwa : ” Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan ”.

Manullang (2006 : 177) mengemukakan bahwa : ” Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan.

Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22). Tujuan Pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakahkn penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga mengemukakan tentang tujuan pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

3. Teknik Pengawasan

1. Pengawasan preventif dan represif

   Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
2. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

   Pengawasan *"intern"* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat Jendral, Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri, seperti BPK.

Bohari (1992:25) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut :

Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:

1. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
2. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
3. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
4. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

4. Fungsi Pengawasan

Saefullah (2005 : 317) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya meruapakan proses yang dilakukan untuk memastiakan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaiamana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang di perlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan

diperlukan untuk memastikan apa yang telah di rencanakan dan di koordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sandiri adalah :

1) Mempertebal rasa tangung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanan pekerjan.
2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjan tidak mengalami hambatan dan pemboosan-pemborosan.

5. Pengawasan yang Efektif

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010, hal. 28) yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid .
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan .
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami .
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi .
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat .
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi .
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya .
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tangung jawab dan prestasi.

E. Kerangka Pemikiran

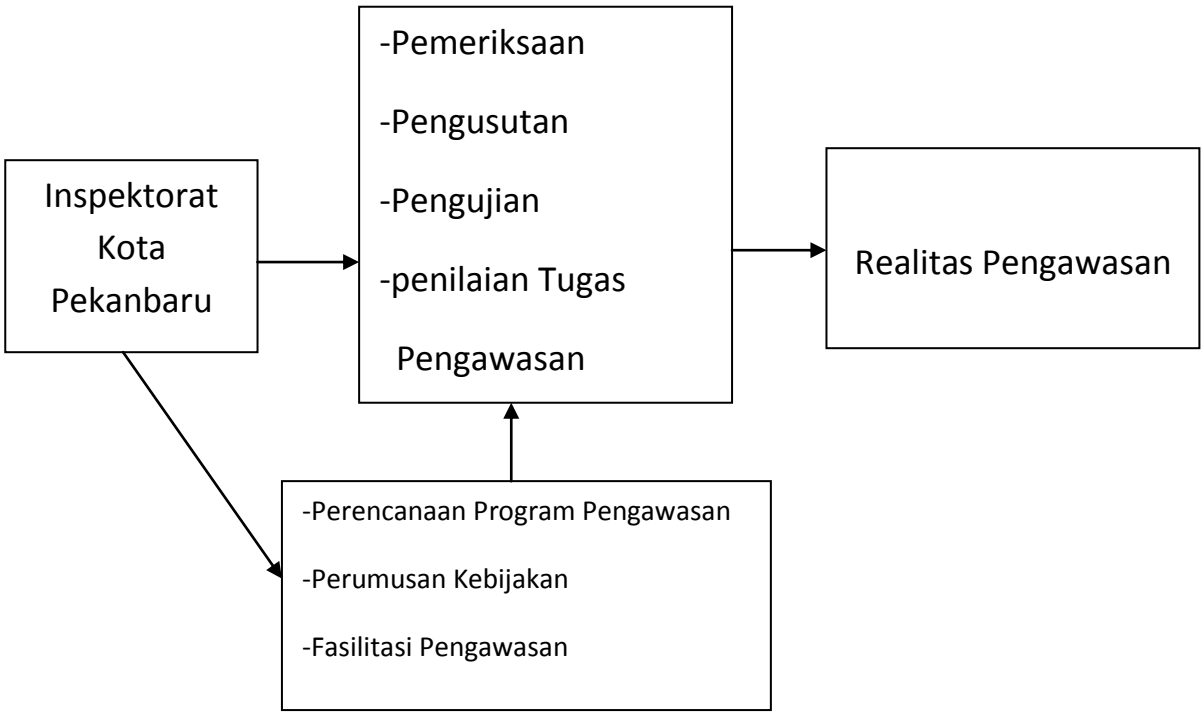

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat). Pendekatan deskriptif, yang diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru, pemilihan lokasi ini adalah karena menurut peneliti disinilah penulis mendapat informasi yang akurat, Sehingga lebih memudahkan dalam mencari dan memperoleh data.

3. Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kota Pekanbaru. Yang dapat memberikan informasi kepada penulis yaitu :

a. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru
b. Pegawai Inspektorat Kota Pekanbaru

Tabel I.2

Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Klasifikasi	Jumlah
1.	H. Zulkifli, SH	Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru	1
2.	Drs.H. Kendi Harahap, MT	Sekretaris Inspektorat Kota Pekanbaru	1
3.	Abdul Majid	Kasubag administrasi & umum	1

4. Jenis atau Sumber Data

a. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi obyek dalam penelitian.
b. Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpul Data

a. Teknik Wawancara atau lisan yaitu penulis mewawancarai langsung dengan informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti.
b. Teknik observasi (Pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan cara mengumpulkan data serta mencatat gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian.
c. Teknik Dokumenter yaitu melacak sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Sumber ini berupa litelatur yang memuat data yang relevan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data dalam metode penelitian dengan menjawap rumusan maslah maka dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono(2008 : 147) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

G. Hasil Penelitan Dan Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan pada Inspektorat Kota Pekanbaru Tahun 2010-2011

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan, dimana Inspektorat Kota Pekanbaru merupakan institusi yang berfungsi sebagai alat pendeteksi dini terhadap kinerja unit kerja atau satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru yang meliputi beberapa aspek yaitu :

1) Aspek Keuangan, yaitu pengujian material pertanggung jawaban dan keabsahannya yang meliputi anggaran dasar, biaya rutin terhadap pengeluaran dan pemasukan keuangan, bendaharawan serta pengadaan yang berkaitan di lingkungan dinas/badan/kantor alat-alat kantor dan gaji honorer.
2) Aspek Perlengkapan, meliputi administrasi terhadap perlengkapan sarana-prasarana dan perlengkapan barang serta kantor, semua ini diatur dan terbentuk bagian-bagian perlengkapan masing-masing unit.
3) Aspek Kepegawaian, meliputi masalah pelatihan, prajabatan serta mutasi, dan dalam pelaksanaan tugas lainya baik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri atau pun Keputusan Kepala Daerah.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat Kota Pekanbaru melakukan peperiksaan terhadap aspek antara lain adalah Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana yang ada lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sistem pemeriksaan dalam melakukan pengawasan dengan masing-masing bidang aktivitas pemerintahan daerah, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa sistem pemeriksaan yang selama ini dilakukan belum fleksibel, alasannya karena dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah belum mampu mengungkap kondisi yang seringkali terjadi.

3. Pelaksanaan Pengusutan dalam Fungsi Pengawasan

Aktivitas pelaksanaan pengawasan selain daripada pemeriksaan juga ditunjang oleh adanya pelaksanaan pengusutan. Oleh karena itulah perlu ditunjang oleh adanya penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur pada Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru, ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan penyelidikan belum terpusat dalam bidang-bidang penyimpangan yang terjadi dan selain itu pelaksanaan penyelidikan belum dilakukan secara tepat waktu.

4. Pelaksanaan Pengujian dalam Fungsi Pengawasan

Berdasarkan hasil penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dan hubungannya dengan pelaksanaan pengusutan dalam fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru maka penilaian selanjutnya adalah melakukan efektivitas pengujian dalam menerapkan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan ternyata dalam melakukan pengujian dengan sejumlah informasi yang diperoleh tidak obyektif, dimana pengujian atas sejumlah informasi yang diterima tidak sesuai dengan bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan karena adanya keterbatasan sejumlah informasi yang ada di lapangan dan selain itu belum adanya koordinasi yang terlibat langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

5. Pelaksanaan Penilaian dalam Fungsi Pengawasan

a) Tindak Lanjut Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesunguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi. Sesuai dengan Instrusksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari :

1. Tindakan adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundag-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negri sipil.
2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu :
   a) Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali.
   b) Tuntutan perbendaharaan
   c) Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll.
3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Repulik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus.
4. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dari hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan ternyata dalam melakukan penilaian dengan sejumlah informasi yang diperoleh tidak obyektif, dimana pengujian atas sejumlah informasi yang diterima tidak sesuai dengan bidang-bidang penyimpangan yang sering terjadi. Salah satu faktor yang menyebabkan karena adanya keterbatasan sejumlah informasi yang ada di lapangan dan selain itu belum adanya koordinasi yang terlibat langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

b. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan fungsi Pengawasan di Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru**

Didalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru dipengaruhi beberapa faktor-faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Kota Pekanbaru yaitu :

1) Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Aparatur (SDM)
2) Opini Negatif dari Obrik terhadap kegiatan pengawasan
3) Sarana dan Prasarana

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang analisis pelaksanaan fungsi Ispektorat Kota Pekanbaru Tahun 2012, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan, dilihat dari pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian, ternyata belum optimal, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawas di kantor Inspektorat Kota Pekanbaru.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Inspektorat Kota Pekanbaru Tahun 2010-2011 terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru adalah meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani, opini negatif dari obrik terhadap kegiatan pengawasan dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Inspektorat Kota Pekanbaru.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar ditingkatkan dan lebih dimatangkan dalam pelaksanaan fungsi perencanaan program pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Disarankan pula, agar terselenggaranya aparatur pengawas yang bersih dan memiliki rasa tanggungjawab dalam menangani setiap pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi Inspektorat Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru.

3. Menambah jumlah personil aparatur pada kontor Inspektorat Kota Pekanbaru dengan menarik sejumlah aparatur dari berbagai bidang disiplin ilmu guna menunjang terselenggaranya pelaksanaan fungsi Inspektorat Kota Pekanbaru yang professional.

4. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung terselenggaranya pelaksanaan fungsi Inspektorat Kota Pekanbaru yang professional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Teks

Fathoni Abdurrahmat, 2006, Organisasi dan Manajemen, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta

Gie,The Liang. *Adminidtrasi Perkantoran Moderen*. Radya Indra, Yogyakarta : 1980

Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah* . Jakarta : LIPI Press

Hasan, M Tolchah, dkk. 2002. Metodologi Penilitian Kualitatif (Tinjauan Teoritis dan Praktis). Malang: Lpunsima

Hasibuan, S.P Malayu. 1991 . *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta : CV. Haji Mas Agung

Kencana, Inu. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* . Bandung : PT. Refika Aditama

Manullang, 2006, Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta

Nasution Mustafa Edwin dan Hardius Usman, 2008, Proses Penelitian Kuantitatif, edisi ketiga, cetakan ketiga, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, Dasar-dasar Manajemen, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta

Sarwoto, 2010, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta

Siagian P. Sondang, 2008, Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta

Singarimbun, Masri dkk. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES

Siswandi dan Indra Iman, 2009, Aplikasi Manajemen Perusahaan, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta

Sudjiwo. 2001. *Metodologi Penilitian Sosial. Bandung :* Mandar Maju

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, cetakan keempat, Penerbit : Alfabeta, Bandung

_____. 2005. *Statistika Untuk Penelitian* . Bandung : Alfabeta

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, Pengantar Manajemen, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta

Sulistiyani, Ambar Teguh dan Rosidah. 2003. *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

S. F. Marbun, 2001, Peradilan Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta

Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, Dasar-dasar Manajemen, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta.

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Wijaya, H.A.W. 2009 Otonomi Daerah dan Daerah Otonom : Jakarta : Rajawali Press.

B. Literatur Lain

Renstra Inspektorat Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

Profil Inspektorat Kota Pekanbaru Tahun 2012

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan*

Keban, Yeremias T. *Good Governance* dan *Capacity Building* Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, Bappenas, (Online), (http://www.bappenas.go.id/index.php/module=filemanager&func=download&pathext=contentExpress/&view=396_Yeremias%20T.%20Keban(9).pdf-Adobe.

Keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 *Tentang pengawasan represif kebijakan daerah.*

Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 *Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2008 *Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru*

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 *Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 18 Tahun 2008 *Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.